

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 DI KECAMATAN SARIO

An Greisye Mariahi¹
Marlien T. Lopian²
Rivo J.D. Sumampouw³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Kota Manado tahun 2016 di Kecamatan Sario. Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Setiap keputusan Politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Masyarakat maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan Politik Pemberian suara dalam kegiatan Pemilihan Umum merupakan bentuk Partisipasi Politik aktif yang seringkali dilakukan oleh Masyarakat di daerah dibandingkan dengan Partisipasi Politik lain. Kegiatan Partisipasi Politik, meskipun kelihatannya hanya menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Masyarakat Kecamatan Sario sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan kepala daerah Kota Manado pada tahun 2016 lalu, dan hal ini juga menunjukkan bahwa antusias dari masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Manado dikarenakan factor figure pasangan calon kepala daerah yang ada, dan juga penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga partisipasi masyarakat Kota Manado khususnya Kecamatan Sario sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan kepala daerah yang ada.

Kata Kunci: : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Perubahan perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan di tingkat lokal. Berbagai proses demokrasi mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah akan memberikan warna baru dalam pola rekrutmen Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah .

Sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, kehidupan demokrasi juga berlangsung di Kota Manado, yaitu: pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sudah sebanyak tiga kali pada Tahun 2005, 2010 dan 2016.

Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan Kepala Eksekutif Daerah melalui Pemilihan langsung (Pilkada Langsung) maka diadakanlah pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2005,2010 dan 2016.

Pada Pilkada langsung ini Masyarakat diberi andil besar untuk memberikan hak pilihnya sebagai bentuk Partisipasi dalam bidang politik yang membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan

kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekrutmen pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal. Secara sederhana, pilkada adalah cara individu warga negara yang mendiami suatu daerah tertentu melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih.

Pada beberapa negara, partisipasi diposisikan sebagai suatu kewajiban, contohnya di Australia, di Indonesia partisipasi merupakan hak warga negara, baik hak memilih maupun tidak memilih.

Sedangkan pemilihan periode selanjutnya yang sesuai jadwal awal seharusnya di laksanakan pada tanggal 9 desember 2015 di tunda pelaksanaannya menjadi tahun 2016 akibat permasalahan Hukum yang mengakibatkan salah satu pasangan calon gugur dan tidak dapat mengikuti pemilihan, dan pada pemilihan Kepala daerah kota manado tahun 2016.

Fenomena yang terjadi di Kota Manado secara keseluruhan tidak jauh berbeda yang terjadi di Kecamatan Sario sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota manado, di mana kecamatan sario merupakan salah satu kecamatan yang penduduknya memiliki latar belakang Pekerjaan dan Suku yang sangat beragam. Fenomena yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2016 lalu, bisa dilihat dari masyarakat kota Manado yang berbeda-beda latar belakang yang ada, mulai dari agama, ras, suku dan budaya, namun walaupun berbeda-beda masyarakat kota Manado yang ada tidak melihat semua itu dan tetap mempersatukan pemikiran mereka tanpa melihat latar belakang dari pasangan calon, baik dari segi agama, ras, suku budaya, yang artinya masyarakat Kota Manado dalam memberikan hak pemilih mereka tidak memandang perbedaan, dan bisa dikatakan masyarakat Kota Manado sudah merupakan pemilih yang rasional yang mampu ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka. Dari segi partisipasi masyarakat yang ada juga bisa dilihat bahwa masyarakat yang ada tidak memandang calon dari latar belakang mereka, melainkan dari

kualitas pasangan calon kepala daerah yang ada di Kota Manado

Tinjauan Pustaka

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Masyarakat tentunya dalam mewujudkan haknya dalam partisipasi politik, dilakukan dengan menggunakan hak pilih dimana terkandung maksud adalah hak untuk menentukan pilihannya terhadap seseorang atau partai yang dapat membawa kepentingan dan aspirasinya, Sukarna (2007). Sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diantaranya dengan memilih Gubernur dan wakil Gubernur.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I.N.Sumaryadi, 2010: 46).

Landasan Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (2006) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:

- Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- Kelompok/komunal : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- Lingkungan (neighbourhood) : perorangan-perorangan yang secara geografi bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- Partai : perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- Golongan (function) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hermawan berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah:

- Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
- Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
- Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu

kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

Berdasarkan teori-teori yang di sampaikan di atas, dapat di simpulkan bahwa Partisipasi Politik adalah keterlibatan masyarakat dalam peristiwa-peristiwa politik misalnya dalam memberikan Suara, terlibat dalam diskusi diskusi politik hingga kegiatan kampanye dan membentuk serta bergabung dalam kelompok-kelompok Kepentingan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu, penetapan fokus akan membatasi jadi dalam fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi atau criteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh sehingga focus dalam penelitian ini akan membandingkan partisipasi politik konvensional di Kota Manado dalam pelaksanaan Kepala daerah pada tahun Tahun 2016.

Menurut Almond (Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney 1990) bentuk bentuk partisipasi politik secara konvensional yaitu: Pemberian suara (voting).

Penelitian ini yang menjadi sumber informasi atau informan adalah orang-orang yang ada dilapangan yang dapat memberikan informasi serta data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu:

1. Anggota LSM 1 Orang
2. Anggota Masyarakat Kelurahan Sario Tumapaan 1 Orang
3. Anggota Masyarakat Kelurahan Sario Kota Baru 1 Orang
4. Anggota Masyarakat Sario Utara 1 Orang

Pembahasan

Dari hasil penelitan yang di peroleh peneliti, maka penelitian ini akan membahas dengan menggunakan teori Almond (Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney 1990) bentuk bentuk partisipasi politik secara konvensional yaitu :

Pemberian suara (voting)

Pada indikator ini peneliti akan melihat sejauh mana partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sario pada pemilihan kepala daerah Kota Manado tahun 2016, yang dimana sesuai data yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sario sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan kepala daerah Kota Manado pada tahun 2016 lalu, dan hal ini juga menunjukkan bahwa antusias dari masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Manado dikarenakan factor figure pasangan calon kepala daerah yang ada, dan juga penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga partisipasi masyarakat Kota Manado khususnya Kecamatan Sario sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan kepala daerah yang ada. Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sario pada pemilihan kepala daerah Kota Manado tahun 2016 juga bisa dilihat dari data yang diperoleh peneliti yang menunjukkan sebagai berikut :



Jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat kecamatan Sario sangat antusias pada pemilihan kepala daerah Kota Manado tahun 2016 lalu, dan jika dilihat dari salah satu faktor kenapa masyarakat sangat antusias, dikarenakan figure pasangan calon yang ada, dan sesuai hasil penelitian yang di peroleh juga, bahwa alasan masyarakat melihat figure pasangan calon, itu karena faktor money politik, yang artinya dalam hal ini masyarakat sampai saat ini tidak bisa terlepas yang namanya politik uang pada setiap pemilihan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kepala daerah berlangsung, padahal semestinya ini menjadi tugas dari partai politik untuk menciptakan kader partai politik mereka untuk setiap pertarungan politik agar tidak menggunakan uang, namun lebih bertarung konsep dan gagasan untuk bisa menarik simpati masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan hak pilih mereka pada salah satu calon tertentu, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan tugas mereka dengan baik, agar pemberian suara masyarakat pada suatu pemilihan kepala daerah tidak berdasarkan uang, melainkan karena konsep dan gagasan dari setiap pasangan calon, karena setiap pasangan calon yang terpilih, akan menjadi pemimpin di daerah untuk periode 5 tahun kedepan.

Dalam proses pemberian suara masyarakat Kota Manado khususnya Kecamatan Sario pada pemilihan kepala daerah tahun 2016 dinilai bahwa masyarakat sudah antusias dan menggunakan hak pilih mereka, namun faktor utama masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih mereka dikarenakan politik uang, dan hal ini tentunya jauh dari harapan yaitu terlahirnya demokrasi yang baik ditengah masyarakat. Namun dalam kesempatan ini juga melihat bahwa faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2016, di karenakan politik uang merupakan kesalahan dari partai politik yang mengusung pasangan calon, sehingga menimbulkan politik uang pada pemilihan kepala daerah Kota Manado tahun 2016 lalu.

Penutup

Kesimpulan

Masyarakat Kecamatan Sario sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan kepala daerah Kota Manado pada tahun 2016 lalu, dan hal ini juga menunjukkan bahwa antusias dari masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Manado dikarenakan factor figure pasangan calon kepala daerah yang ada, dan juga penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga partisipasi masyarakat Kota

Manado khususnya Kecamatan Sario sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka pada pemilihan kepala daerah yang ada.

Saran

Disarankan juga untuk pemilihan kepala daerah Kota Manado selanjutnya agar supaya dari penyelenggara sendiri tetap mengawasi proses berjalanya pemilihan kepala daerah, karena walaupun partisipasi dari masyarakat Kota Manado sudah antusias dalam memberikan hak suara mereka, namun itu semua karena faktor politik uang, dan juga bagi partai politik yang ada dalam mengusung pasangan calon untuk dapat memberikan pendidikan politik lebih lagi, karena pada saat proses pemilihan kepala daerah sendiri masih banyak didapati adanya politik uang, terlebih khusus pada pemilihan kepala daerah Kota Manado tahun 2016

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- A. D., Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Inside Book Center.
- Budiardjo, Mirriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Davis, Gordon B. 2013. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Palembang: Maxikom.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 2000. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw – Hill Book Company.
- Fasli dan Supriadi, Djalal Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik (edisi revisi)*. Malang: Setara Press.
- Harahap. 2005. *Manajemen Dan Resolusi Konflik*. Pustaka Cidesindo Jakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. *“Partisipasi Politik di Negara Berkembang”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Michael,Rush, Althoff, Phillip dan. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- May,Rudy. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Maswadi, Rauf. 1997.*Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nelson.2006 *“Partisipasi Politik di Negara Berkembang”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta : Andi
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 2007. *Partisipasi Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs - UNY.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Yuwono, Teguh. 2001, *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang